

# Pemikiran politik islam menurut perspektif Hasan Al-Bana dan Sayyid Quthb

Ahsin Haris Ulinnuha

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: nuhapratamao2@gmail.com

## Kata Kunci:

Politik islam, Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, ikhwanul muslimin, hakimiyyah

## Keywords:

Politics of Islam, Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, muslim brotherhood, sovereignty

## ABSTRAK

Artikel ini membahas pemikiran politik dua tokoh berpengaruh dalam perkembangan gerakan Islam modern, yaitu Hasan al-Banna dan Sayyid Quthb. Keduanya merupakan figur sentral Ikhwanul Muslimin yang memberikan fondasi ideologis penting bagi kebangkitan politik Islam di abad ke-20. Kajian ini bertujuan menguraikan perjalanan intelektual kedua tokoh, menjelaskan pokok pemikiran mereka, serta menganalisis persamaan, perbedaan, dan relevansinya terhadap dinamika politik Islam kontemporer. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui studi literatur atas karya utama dan interpretasi para sarjana. Hasil analisis menunjukkan bahwa al-Banna dan Quthb sama-sama memandang Islam sebagai sistem hidup yang menyeluruh (syumul), menolak sekularisme, serta menempatkan syariat sebagai dasar kehidupan sosial dan politik. Meski demikian, pendekatan keduanya berbeda secara signifikan: al-Banna menekankan transformasi bertahap melalui dakwah, pendidikan, dan pembinaan moral, sedangkan Quthb lebih ideologis dan konfrontatif dengan penekanan pada konsep hakimiyyah dan jahiliyah modern. Pemikiran keduanya tetap relevan dalam wacana politik Islam masa kini, baik dalam konteks gerakan moderat yang menitikberatkan pada pembinaan umat maupun dalam kritik terhadap struktur sosial-politik modern yang dianggap menjauh dari nilai-nilai Islam.

## ABSTRACT

This article examines the political thought of two influential figures in modern Islamic movements, Hasan al-Banna and Sayyid Qutb. Both played central roles in shaping the ideological foundation of the Muslim Brotherhood and contributed significantly to the rise of Islamic political consciousness in the twentieth century. This study aims to explore their intellectual backgrounds, outline their key political ideas, and analyze the similarities, differences, and contemporary relevance of their perspectives. Using a descriptive-qualitative approach based on literature review, the analysis reveals that both al-Banna and Qutb view Islam as a comprehensive system that governs all aspects of life, reject secularism, and emphasize the centrality of Sharia in social and political structures. However, their approaches differ substantially: al-Banna advocates gradual transformation through education, moral cultivation, and community development, while Qutb adopts a more ideological and confrontational stance, especially through his concepts of hakimiyyah (divine sovereignty) and modern jahiliyyah. Their ideas remain relevant in current debates on Islamic political thought, influencing both moderate reformist movements and critical perspectives on modern socio-political systems.



## Pendahuluan

Pemikiran politik Islam mengalami perkembangan yang sangat signifikan pada abad ke-20, terutama melalui munculnya gerakan Islam modern seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir. Gerakan ini tidak hanya menjadi aktor penting dalam dinamika politik domestik Mesir, tetapi juga berfungsi sebagai laboratorium ideologis yang memengaruhi pergerakan Islam di berbagai belahan dunia. Dua tokoh sentral yang membentuk arah dan karakter ideologi gerakan ini adalah Hasan al-Banna dan Sayyid Quthb. Keduanya memberikan fondasi teoretis dan praksis bagi kebangkitan Islam politik, meskipun melalui pendekatan dan metodologi yang berbeda.

Hasan al-Banna menekankan transformasi sosial-politik secara bertahap melalui dakwah, pendidikan, pembinaan moral, serta penguatan komunitas sebagai basis perubahan. Baginya, reformasi masyarakat harus dimulai dari perbaikan individu dan keluarga sebelum menuju perubahan negara. Sementara itu, Sayyid Quthb mengembangkan pemikiran yang lebih kritis, radikal, dan revolusioner, dengan menekankan konsep hakimiyyah (kedaulatan hukum Allah), pentingnya penegakan syariat secara total, serta kritik tajam terhadap struktur sosial politik yang dianggap sebagai manifestasi jahiliyyah modern. Perbedaan pendekatan keduanya tidak hanya menggambarkan dinamika internal dalam tubuh gerakan Islam, tetapi juga mencerminkan keragaman orientasi politik Islam kontemporer yang kemudian memengaruhi berbagai gerakan Islam global, termasuk di Asia Tenggara dan Indonesia.

Meski berbeda, pemikiran keduanya memiliki pengaruh yang luas di tingkat global. Gagasan tentang pembaharuan masyarakat Islam, kritik terhadap modernitas, serta konsep negara dan syariat telah menginspirasi banyak gerakan Islam di berbagai negara. Di Indonesia, pengaruh ini tampak dalam gerakan dakwah kampus, organisasi Islam modern, serta wacana politik Islam kontemporer yang mengadopsi baik secara langsung maupun adaptif pemikiran Al-Banna dan Quthb. Dengan demikian, kontribusi kedua tokoh ini tidak hanya bersifat historis, tetapi juga terus hidup dalam diskursus dan praktik politik Islam hingga saat ini.

## Pembahasan

### Biografi Hasan Al-Banna dan Sayyid Quthb

#### *Biografi Hasan Al-Banna*

Hasan Ahmad Abdel Rahman al-Banna dilahirkan pada tahun 1906 M (1324 H) di desa al-Mahmudiyah, Provinsi Beheira, Mesir, dalam sebuah keluarga yang dikenal taat beragama dan berilmu (Brykczynski, 2005). Sejak kecil, lingkungan keluarganya sangat memengaruhi pembentukan karakternya. Ayahnya, Syaikh Ahmad al-Banna, adalah seorang ulama lulusan Al-Azhar yang memiliki pengetahuan luas, khususnya dalam bidang Hadis dan Fiqh, serta dikenal sebagai seorang teknisi reparasi jam dan memiliki perpustakaan pribadi yang kaya. Ayahnya menanamkan disiplin agama, semangat menghafal Al-Qur'an, dan kecintaan pada ilmu pengetahuan sejak dini.

Pendidikan dasar Al-Banna dimulai di sekolah agama lokal. Kecenderungan reformatifnya sudah terlihat saat remaja, di mana ia aktif dalam berbagai perkumpulan

seperti *Jam'iyah al-Akhlaq al-Adabiyyah* (Perkumpulan Etika dan Sastra) dan *Jam'iyah Man'il Muharramat* (Perkumpulan Pencegah Kemungkaran). Pada tahun 1923, Al-Banna melanjutkan pendidikannya ke Dar al-Ulum di Kairo, sebuah institusi yang unik karena memadukan kurikulum Islam tradisional dengan studi modern, mempersiapkannya untuk menjadi guru (Akbar & Saeed, 2019). Ia berhasil lulus pada tahun 1927 dengan predikat terbaik dan kemudian ditugaskan sebagai guru sekolah dasar di kota Isma'iliyah. Penugasan ke Isma'iliyah menjadi titik balik dalam hidupnya. Kota ini merupakan pusat administrasi Terusan Suez, yang didominasi oleh kehadiran dan gaya hidup orang-orang Inggris dan Eropa. Di sana, ia menyaksikan secara langsung kontras yang tajam antara kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat Mesir dengan kemewahan serta dominasi kultural dan ekonomi Barat. Kenyataan inilah yang mendorong Al-Banna pada kesimpulan bahwa masalah umat Islam Mesir bukan hanya masalah spiritual, melainkan masalah politik, sosial, dan sistemik yang diakibatkan oleh kolonialisme dan sekularisme (Mura, 2012).

Pada Maret 1928, bersama enam pekerja kilang minyak, Hasan al-Banna mendirikan Al-Ikhwān al-Muslimīn (Ikhwān al-Muslimīn). (Munawir, 2019) Gerakan ini didasarkan pada konsep *Syumuliyat al-Islam* (Islam yang komprehensif), yang menekankan bahwa Islam adalah solusi lengkap (*nizham kamil*) bagi kehidupan, mencakup aspek agama, politik, sosial, dan ekonomi. Strategi dakwahnya bersifat bertahap, dimulai dari pembinaan spiritual (*Tarbiyah*) individu dan keluarga, kemudian meluas ke reformasi sosial dan akhirnya mencapai tujuan politik untuk mendirikan negara yang diatur berdasarkan syariat Islam. Dalam dua dekade, Ikhwān al-Muslimīn berkembang pesat menjadi gerakan massa yang memiliki cabang di Mesir dan luar negeri, didukung oleh jaringan sekolah, klinik, dan perusahaan. Peran Al-Banna sebagai *Mursyid al-'Am* (Pemimpin Umum) berlanjut hingga ia wafat.

Ketegangan antara Ikhwān al-Muslimīn dan pemerintahan Mesir yang didukung Inggris meningkat, memuncak pada pembubaran gerakan tersebut oleh Perdana Menteri Nuqrashi Pasha. Pada 12 Februari 1949, tak lama setelah PM Nuqrashi dibunuh oleh anggota Ikhwān al-Muslimīn (meski Al-Banna dituduh tidak terlibat), Hasan al-Banna sendiri tewas dibunuh di Kairo oleh agen-agen keamanan pemerintah dalam sebuah serangan yang terencana. Kematiannya menandai berakhirnya era kepemimpinan pendiri, tetapi ideologi dan gerakan yang ia bangun terus berkembang dan memengaruhi politik Islam global hingga hari ini

### **Biografi Sayyid Quthb**

Sayyid Quthb Ibrahim Husain Syadzili lahir pada tanggal 9 Oktober 1906 M di desa Musha, Provinsi Asyut, Mesir Hulu. Ia dibesarkan dalam lingkungan pedesaan yang kental dengan nilai-nilai Islam tradisional, dan berhasil menyelesaikan hafalan Al-Qur'an (hafiz) pada usia sepuluh tahun (Rahman, 2022). Latar belakang keluarga Quthb memiliki kesadaran politik yang tinggi; ayahnya adalah seorang petani terhormat yang juga aktif dalam kancah politik lokal dan mendukung gerakan nasionalis *Musthafa Kamil*. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Quthb pindah ke Kairo. Ia melanjutkan studi di Institut Diklat Keguruan dan kemudian memperoleh gelar sarjana di bidang Sastra Arab dari *Kulliyah Dar al-Ulum* (Universitas Kairo) pada tahun 1933.

Di awal kariernya, Quthb adalah seorang kritikus sastra, penyair, dan intelektual sekuler terkemuka yang bekerja di Kementerian Pendidikan Mesir. Karyanya pada periode ini, seperti *At-Taswir al-Fanni fi al-Qur'an* (Penggambaran Artistik dalam Al-Qur'an), menunjukkan kepekaan estetika yang mendalam, namun pandangan politiknya belum sepenuhnya terislamkan. Titik balik utama dalam hidupnya terjadi ketika ia dikirim oleh Kementerian Pendidikan untuk tugas belajar ke Amerika Serikat pada tahun 1948 hingga 1950. Di Amerika Serikat, Quthb menyaksikan secara langsung apa yang ia anggap sebagai materialisme, dekadensi moral, dan rasisme yang mewarnai peradaban Barat. Kontras tajam antara nilai-nilai Barat yang ia lihat dengan ajaran Islam yang ia yakini memantapkan pandangannya tentang perlunya Islam sebagai satu-satunya ideologi alternatif bagi dunia. Sekembalinya ke Mesir, ia secara penuh meninggalkan karier sastranya dan bergabung dengan Ikhwanul Muslimin sekitar tahun 1951, segera menjadi ideolog dan editor majalah mereka.

Quthb sempat mendukung kudeta Gamal Abdul Nasser dan Perwira Bebas pada tahun 1952, berharap revolusi tersebut akan mengarah pada pemerintahan Islam. Namun, hubungan antara Ikhwanul Muslimin dan rezim Nasser memburuk dengan cepat. Pada tahun 1954, setelah upaya pembunuhan yang gagal terhadap Nasser, Ikhwanul Muslimin dilarang, dan Quthb ditangkap bersama ribuan anggota lainnya. Pengalaman di penjara merupakan periode paling krusial yang meradikalisasi pemikirannya. Bertahun-tahun disiksa secara brutal di balik jeruji besi mengubahnya dari seorang aktivis menjadi seorang ideolog revolusioner. Di penjara inilah ia menyelesaikan karya-karya utamanya: tafsir monumental *Fī Zhilāl al-Qur'ān* (Di Bawah Naungan Al-Qur'an) dan manifesto politiknya, *Ma'alim fi al-Tariq* (Petunjuk Jalan) (Roni & Anzaikhan, 2022).

Dalam karyanya *Ma'alim fi al-Tariq*, Quthb merumuskan konsep sentral Hakimiyyah (Kedaulatan Allah) dan menyatakan bahwa masyarakat Muslim modern yang tidak menerapkan syariat Islam telah kembali ke masa Jahiliyah (kebodohan pra-Islam). Pemikiran militan ini membuatnya dituduh merencanakan penggulingan Nasser. Pada tahun 1966, setelah pengadilan militer yang kontroversial, Sayyid Quthb dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi gantung pada tanggal 29 Agustus 1966. Meskipun dieksekusi, pemikirannya, terutama konsep Jahiliyah dan Hakimiyyah, memiliki warisan intelektual yang sangat luas dan mendalam, memengaruhi banyak gerakan Islamis revolusioner dan militan di seluruh dunia hingga saat ini.

## **Pokok-pokok Pemikiran Politik Hasan Al-bana dan Sayyid Quthb**

### ***Pemikiran Politik Hasan Al-bana***

Sejak berdirinya Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna tahun 1928, Peta politik di Mesir memasuki suatu fase baru. Kebijakan yang diterapkan oleh para pemimpin yang berkuasa di Mesir mengalami perubahan serta dinamika yang signifikan, yang berkaitan dengan interaksinya dengan Ikhwanul Muslimin. Interaksi antara Ikhwanul Muslimin dan pemerintah Mesir dapat dipetakan dalam dua periode, yaitu periode pra-revolusi dan pascarevolusi. Pertama, periode pra-revolusi. Pergulatan Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah Mesir sering diwarnai adanya konspirasi, penindasan, yang kemudian disambut dengan demonstrasi dan persaingan merebut

kekuasaan. Kekuatan mereka yang mengakar, sangat ditakuti pemerintahan Ahmad Mahir Pasha, Oleh karena itu, terdapat upaya untuk menghalangi Ikhwanul Muslimin dalam persaingan pemilu melalui pemalsuan hasil pemilu, penghalangan terhadap para calon, serta penangkapan terhadap para aktivis Ikhwanul Muslimin. Selanjutnya, pada periode pasca-revolusi, terdapat tiga pemerintahan di Mesir yang melibatkan Ikhwanul Muslimin, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui interaksi yang bersifat konfrontatif-radikal maupun moderat (Ramadhani, 2021).

Menurut perspektif Hasan Al-Banna, unsur paling mendasar kekuasaan dalam Islam adalah kaidah sosial, yang terkait dengan etika, nilai-nilai, norma, dan kehidupan sosial lainnya yang memastikan keberlangsungan interaksi di suatu wilayah. Dengan demikian, kekuasaan harus digunakan untuk kepentingan bersama. Hasan Al-Banna, seperti yang disebutkan dalam hadist Rasul, mengakui bahwa pemimpin adalah sumber kekuasaan. Dengan merujuk kepada Rasulullah Saw yang menjadikan pemerintahan sebagai salah satu aspek yang melekat dalam ikatan Islam, dapat disimpulkan bahwa Islam mencakup aspek hukum dan pengalaman yang seharusnya diakui sebagai pedoman yang terintegrasi, baik dalam bentuk undang-undang maupun ajaran, serta dalam bentuk peraturan dan keputusan. Hal ini menegaskan bahwa tidak seharusnya ada pemisahan antara aspek-aspek tersebut. Bagi Al Banna, isu pemerintahan ini merupakan hal yang sangat krusial dan penting.

### ***Pemikiran Sayyid Qutb***

Sebelum membahas pemikiran kenegaraan Sayyid Qutb, satu hal yang kiranya perlu disampaikan adalah pandangan Qutb secara umum mengenai konsepsi masyarakat. Bagi Qutb, secara umum masyarakat dibagi ke dalam dua bagian yakni "Masyarakat Islam" dan "Masyarakat Jahiliyah". Masyarakat Islam adalah masyarakat yang melaksanakan Islam baik dalam akidah dan ibadah, dalam syariat dan nizam, maupun dalam akhlak dan perilaku. Sebaliknya, masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang tidak melaksanakan Islam. Masyarakat ini tidak dikendalikan oleh akidah dan konsepsi Islam, juga tidak oleh nilai, mizan, syariat, akhlak dan perilaku Islam. 35 Pembagian masyarakat ke dalam dua jenis ini terasa agak ketat, hitam putih dan terkesan ekstrem. Dengan demikian, kriteria masyarakat untuk disebut Islam atau jahil adalah tergantung dari dijalankan tidaknya ajaran Islam (Zalmatin dkk, 2023).

Seorang pemikir, penulis, dan cendekiawan Islam Mesir bernama Sayyid Qutb memiliki pengaruh yang signifikan terhadap gerakan Islam politik pada abad ke-20. Teoriteorinya membahas berbagai masalah yang sering menimbulkan kontroversi, seperti politik, keadilan sosial, dan kebebasan individu. Dalam pemikiran Qutb, radikalisme berkaitan dengan pemikirannya tentang Hakimiyyat Allah, atau kekuasaan Tuhan, yang menurutnya hanya Tuhan yang memiliki kekuasaan absolut dan bahwa pemerintahan manusia harus didasarkan pada ajaran Islam.

Qutb mengembangkan konsep Takfir dari gagasan-gagasan ini. Takfir adalah proses mengatakan bahwa seseorang atau kelompok orang Islam telah menjadi kafir, atau murtad, karena mereka tidak menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang benar. Dalam pemikirannya, Qutb mendukung penggunaan kekerasan untuk menggulingkan sistem yang dia anggap tidak Islami dan membangun masyarakat Islam

berdasarkan nilai-nilai Islam yang benar. Berbagai kelompok Islamis radikal dan organisasi jihadis telah mendapatkan inspirasi dari ide-ide ini. Sayyid Qutb telah disebut oleh beberapa kelompok teroris, seperti Al-Qaeda, sebagai intelektual yang mempengaruhi pendapat dan tindakan mereka. Meskipun banyak orang tidak setuju dengan interpretasi radikal Qutb, pemikirannya masih dibahas dan diperdebatkan di dunia Islam (Yuwana, 2020). Secara keseluruhan, ide-ide Sayyid Qutb mencakup berbagai masalah yang sangat radikal dan ekstrem, dan memengaruhi banyak pemikir dan aktivis Muslim di seluruh dunia. Pandangan ini, bagaimanapun, tidak mencerminkan keyakinan mayoritas umat Islam, yang lebih moderat dan menolak penggunaan kekerasan atas nama agama. Namun, pandangan ini tidak mencerminkan pandangan mayoritas umat Islam, yang lebih moderat dan tidak setuju dengan penggunaan kekerasan atas nama agama.

### **Relevansi pemikiran mereka dalam konteks politik Islam kontemporer**

Politik Islam adalah sistem pemikiran dan praktik politik yang bersumber dari ajaran Islam, terutama Al-Qur'an, Sunnah, serta ijtihad para ulama. Fokus utamanya adalah bagaimana nilai-nilai keadilan, musyawarah, kemaslahatan, dan persamaan diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat (Salsabila, 2025). Pemikiran Hasan al-Banna terus menunjukkan relevansinya dalam politik Islam kontemporer karena menawarkan model perubahan yang berakar pada dakwah, pendidikan, dan pembinaan umat secara bertahap. Ia menekankan bahwa transformasi sosial tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba, melainkan harus dimulai dari penguatan individu dan keluarga, kemudian bergerak ke arah pembentukan masyarakat dan negara yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pendekatannya yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan sosial menjadikan al-Banna panutan bagi banyak gerakan Islam yang ingin terlibat dalam ruang publik tanpa menggunakan pendekatan kekerasan. Konsepnya tentang sinergi antara kerja sosial, moral, dan politik memberikan kerangka yang fleksibel untuk menghadapi berbagai tantangan modern seperti sekularisasi, krisis nilai, dan pudarnya identitas keagamaan.

Tidak sedikit organisasi dakwah dan sosial di berbagai negara yang masih menjadikan gagasan al-Banna sebagai pedoman, karena mampu menjawab kebutuhan pembinaan umat sekaligus tuntutan partisipasi dalam kehidupan sosial-politik yang terus berkembang (Zamri, 2022). Sementara itu, Pemikiran Sayyid Quthb tetap sangat berpengaruh dalam perkembangan politik Islam masa kini, terutama karena kritiknya terhadap ketidakadilan sosial, penetrasi budaya Barat, dan sistem politik yang dinilai menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai ketuhanan. Konsep jahiliah modern yang ia populerkan terus digunakan sebagai kerangka analisis untuk membaca kondisi sosial yang dianggap kehilangan kompas moral dan spiritual. Panggilannya untuk kembali kepada hukum Allah serta pentingnya membentuk kelompok inti yang memiliki komitmen dan integritas kuat telah menginspirasi berbagai gerakan Islam yang mendorong perubahan mendasar dalam struktur politik. Di tengah realitas dunia yang sarat ketimpangan dan pengaruh ideologi sekuler, pemikiran Quthb tentang keadilan sosial, penolakan terhadap tirani, dan penguatan identitas Islam tetap menjadi rujukan penting bagi kalangan aktivis, pemikir, dan organisasi keislaman di era modern

Pemikiran Sayyid Quthb juga terus memberikan pengaruh yang kuat dalam wacana politik Islam modern, terutama karena kritiknya yang tajam terhadap ketidakadilan sosial, imperialisme budaya, dan dominasi ideologi Barat yang dianggap menggerus identitas umat Islam. Gagasan tentang “jahiliyah modern” yang ia rumuskan menjadi salah satu konsep penting untuk menganalisis realitas masyarakat yang dianggap menjauh dari nilai-nilai Islam. Konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kritik, tetapi juga menjadi pemicu bagi upaya pembaruan pemikiran, pembebasan ideologis, dan penguatan komitmen moral umat. Pandangannya mengenai urgensi penegakan hukum Allah serta perlunya pembentukan kelompok inti yang berkomitmen tinggi telah menginspirasi berbagai gerakan yang berfokus pada perubahan mendasar dalam struktur sosial dan politik

Dari kedua pemikiran tersebut relevansi Politik Islam tidak hanya membahas kekuasaan, tetapi juga etika bernegara, hubungan antara pemimpin dan rakyat, tata kelola hukum, perlindungan hak-hak masyarakat, hingga urusan luar negeri (siyasah dauliyah). Intinya, Politik Islam berupaya mewujudkan tatanan sosial yang adil, beradab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat (Sutaman, 2025). Selain itu dalam konteks politik, sosial, dan ekonomi, Politik Islam memandang ketiganya sebagai pilar yang saling melengkapi. Secara politik, Islam menuntut tata kelola yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Secara sosial, ajaran Islam menekankan kesetaraan, solidaritas, serta perlindungan bagi kelompok lemah untuk menjaga keteraturan sosial. Sementara secara ekonomi, Islam mengarahkan terciptanya sistem ekonomi yang berkeadilan melalui pengelolaan zakat, larangan riba, distribusi kekayaan yang merata, dan kebijakan yang memastikan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Politik Islam berusaha mewujudkan integrasi antara kekuasaan yang adil, kehidupan sosial yang harmonis, dan ekonomi yang menyejahterakan (Hidayatullah, 2024).

## Kesimpulan dan Saran

Pemikiran politik Hasan al-Banna dan Sayyid Quthb merupakan dua fondasi utama yang membentuk arah gerakan Islam modern, khususnya dalam tubuh Ikhwanul Muslimin. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembalikan Islam sebagai sistem hidup yang menyeluruh dan menegakkan nilai-nilai syariat dalam tatanan sosial, politik, dan pemerintahan. Namun, pendekatan dan metode yang mereka gunakan berbeda sesuai konteks sejarah, pengalaman hidup, dan kondisi politik yang mereka hadapi. Hasan al-Banna menekankan pendekatan gradual, reformis, dan berbasis dakwah. Baginya, perubahan politik harus dimulai dari pembentukan individu yang berakhlak, keluarga yang islami, hingga terbentuk masyarakat yang kuat secara moral dan spiritual. Ia membuka ruang bagi partisipasi politik melalui jalur konstitusional, dialog, dan pendidikan. Pemikirannya mencerminkan strategi perubahan sosial yang inklusif, terstruktur, dan evolutif.

Sayyid Quthb menghadirkan corak pemikiran yang lebih ideologis dan konfrontatif. Pengalaman pahitnya dalam penjara membuat ia melihat negara sekuler otoriter sebagai bentuk jahiliyyah modern. Dari sini lahir konsep hakimiyyah, yaitu kedaulatan mutlak milik Allah, yang menuntut perubahan sistem politik secara menyeluruh. Quthb menegaskan bahwa perubahan tidak cukup dengan reformasi moral

dan pendidikan saja, tetapi membutuhkan perjuangan struktural bahkan revolusioner untuk mengganti sistem yang dianggap tidak islami. Meski berbeda pendekatan, keduanya memperkaya wacana politik Islam kontemporer. Pemikiran mereka masih relevan dalam membaca dinamika hubungan agama dan negara, tantangan sekularisme, serta perkembangan gerakan Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Keduanya juga menjadi rujukan penting dalam studi Islam politik, baik dalam konteks moderasi maupun kritik terhadap radikalisme.

Secara keseluruhan, pemikiran Hasan al-Banna dan Sayyid Quthb menunjukkan bahwa Islam politik bukanlah satu arus tunggal, tetapi memiliki spektrum yang luas, mulai dari pendekatan gradualis hingga ideologis-revolusioner, namun tetap berorientasi pada upaya menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## Daftar Pustaka

- Akbar, A., & Saeed, A. (2019). Abdolkarim Soroush. In *Contemporary Approaches to the Qur'an and Its Interpretation in Iran*. <https://doi.org/10.4324/9780367272067-4>
- Brykczynski, P. (2005). *Radical Islam and the Nation: The Relationship between Religion and Nationalism in the Political Thought of Hassan al-Banna and Sayyid Qutb*. *History of Intellectual Culture*, 5(1), 1–19.
- Hidayatullah, A. D. (2024). Kontribusi sistem pendidikan Islam terhadap transformasi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2, hal.101-119. <http://repository.uin-malang.ac.id/19997/>
- Kirom, Makhiulil dan Sutaman, S. (2025). Evolusi wacana keagamaan dalam Islam kontemporer: Perspektif linguistik-filosofis. *Eralingua: Jurnal Pendidikan Bahasa Asing dan Sastra*. *Jurnal Pendidikan Bahasa Asing Dan Sastra*, 9, hal.323-337. <http://repository.uin-malang.ac.id/23682/>
- Munawir, M. F. (2019). Masyarakat Islam Kontemporer. *Jurnal Dakwah*, XI(1), 23.
- Mura, A. (2012). A genealogical inquiry into early islamism: The discourse of hasan al-banna. *Journal of Political Ideologies*, 17(1), 61–85.
- Rahman, M. T. (2022). Prinsip-prinsip Keadilan Distributif dalam Pemikiran Sayyid Qutb. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(2), 211–216. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i2.17779>
- Ramadhani, Y. (2021). Ideologi Keagamaan, Partai Politik, dan Pendidikan Islam: Refleksi Pemikiran Hasan Al-Banna di Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 5(1), 78–92.
- Roni, M., & Anzaikhan, M. (2022). Konsep Pemikiran Sayyid Qutb tentang Bai'ah: Studi Analisis Tafsir Fi Zilalil Qur'an. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6(1), 61. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i1.3182>
- Salsabila, Fajrina Dhia and Fadil, F. (2025). Peradaban Islam Pada Masa Khalifah Al-Rasyidah I-II; Idealitas dan Realitas, Terbentuknya Khilafah, Perkembangan Islam dan Politik. *IHSAN JURNAL PENDIDIKAN ISLAM*, 3. <http://repository.uin-malang.ac.id/25313/>
- Yuwana, L. (2020). Teologi Islam Sayyid Qutb. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 18(1).
- Zalmatin dkk, W. O. (2023). Sayyid Quthb dan Pemikiran Politik Islam. *Edu Sociata: Jurnal*

Pendidikan Sosiologi, 6, 1210–1211.

Zamri, I. H. M. (2022). Seminar Dakwah & Wahdah Al-Ummah 2022, Interaksi Dakwah di Malaysia Merentas Zaman , 14-15 Julai 2022, Fakulti Pengajian Islam, UKM. Jurnal Universiti Kebangsaan Malaysia, 14–15.